

#### **4. PELAKSANAAN SPN; Kasus penanganan konflik pengelolaan sumberdaya hutan di Sumberjaya.**

Luas kawasan hutan di Propinsi Lampung, menurut SK. Menhutbun No.256/KPTS-II/2000 dan Hasil Kajian Tim Redesain TGHK Propinsi Lampung, tahun 1999, tercatat seluas 1.004.735 ha atau 30,43% dari total luas wilayah Lampung. Menurut statusnya, luas areal kawasan hutan ini terdiri atas: Hutan Lindung seluas 317.613 ha atau 9,62%, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata seluas 462.030 ha atau 13,99%, Hutan Produksi Terbatas seluas 33.358 ha atau 1,01%, dan Hutan Produksi Tetap seluas 191.732 ha atau 5,81%. Hampir sebagian besar wilayah kawasan hutan tersebut sudah terbuka menjadi areal budidaya perkebunan terutama untuk tanaman kopi dan sebagian lagi terus menerus semakin terbuka sebagai akibat perladangan dan pembukaan hutan secara intensif. Kondisi ini menyebabkan luas areal hutan diperkirakan efektif sesuai dengan fungsinya hanya mencapai 50--60% dan sisanya sudah terbuka atau beralih fungsi sebagai perkebunan rakyat dan perladangan serta permukiman. Menurut catatan Kanwil Kehutanan pada tahun 1998 Kawasan Hutan Lindung telah mengalami kerusakan 69,99%, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 31,37 %, serta Kawasan Hutan Produksi 76,74%.

Kecamatan Sumberjaya terletak di hulu DAS Tulangbawang, atau tepatnya Sub-DAS Way Besay, Kabupaten Lampung Barat. Di dalam sub-DAS tersebut terdapat beberapa kawasan Hutan Lindung yang fungsi ekosistemnya memiliki pengaruh penting terhadap fungsi DAS. Kawasan-kawasan tersebut yaitu:

- (1) Register 39 Kota Agung Utara (49.994 hektar),
- (2) Register 44B Way Tenong Kenali (14.000 hektar),
- (3) Kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis (8.295 hektar), dan
- (4) Register 46B Palakiah (1800 hektar)

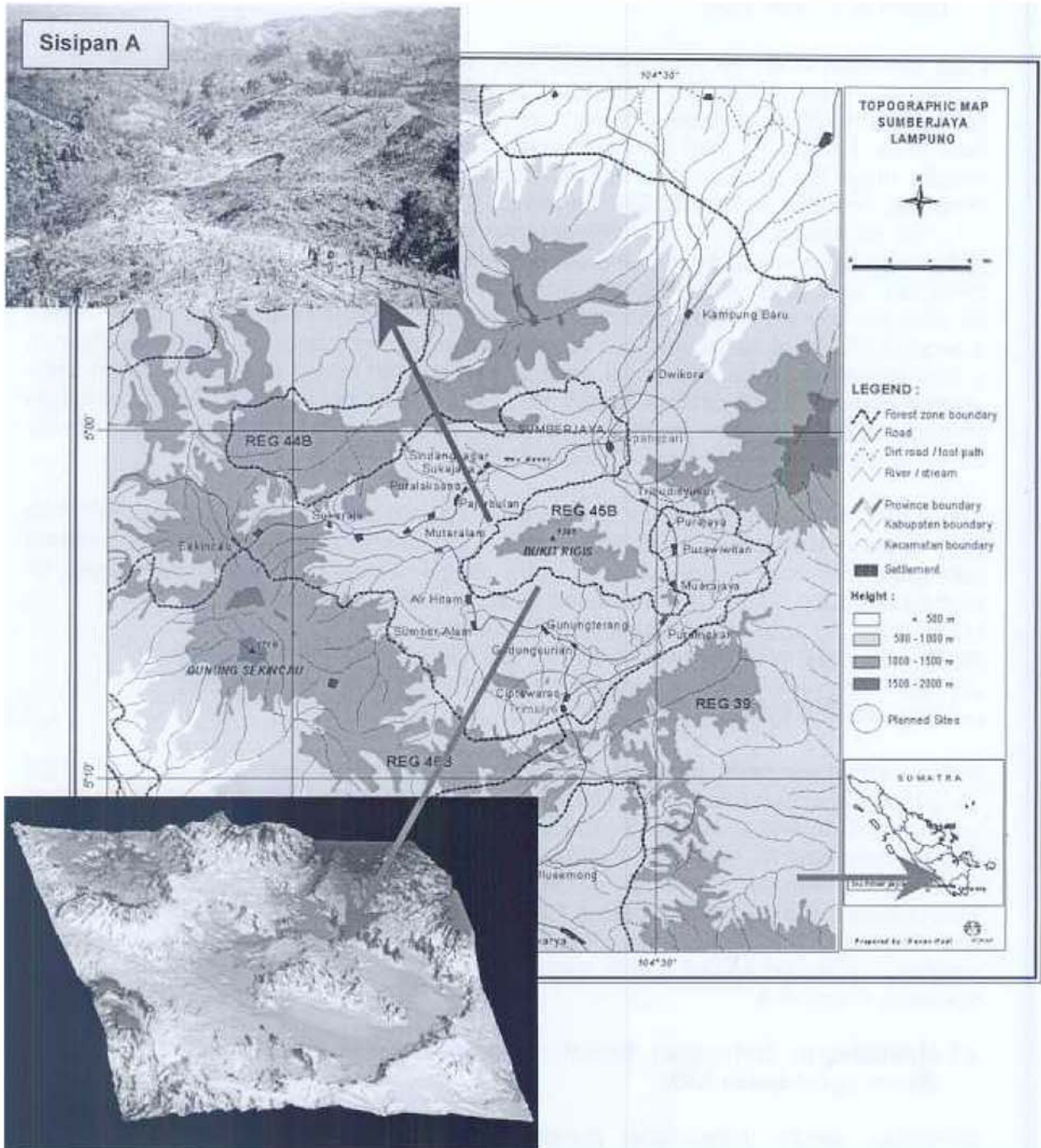
Dari keempat kawasan tersebut, kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis yang memiliki luas 8.295 hektar, merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya paling berpengaruh terhadap sub-DAS Way Besay karena letaknya yang berada di tengah-tengah dan hampir menutupi seluruh wilayah sub-DAS seperti ditayangkan pada Gambar 5. Register tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan pada masa kolonialisasi Belanda melalui besluit Residen No.117 tanggal 19 Maret 1935 dengan luas 8.295 ha. Kerusakan hutan di kawasan ini sudah mencapai tingkat kritis dengan estimasi kerusakan seluas 6.000 hektar. Contoh rona fisik seperti ditayangkan pada Sisipan A Gambar 5.

##### **4.1 Membangun Hubungan Sosial; Sebuah langkah awal identifikasi konflik dalam pendekatan SPN**

Identifikasi konflik pengelolaan sumberdaya hutan oleh ICRAF dan mitra mulai dilakukan sejak tahun 1997. Pada saat itu, identifikasi konflik belum dilakukan secara khusus, namun, beberapa isu sumber konflik sudah mulai dieksplorasi di dalam beberapa bidang kajian yang dilakukan yaitu kajian sosial ekonomi di empat desa (Desa Gunung Terang, Sukapura, Simpang Sari, dan Trimulyo) dan kajian kebakaran hutan khususnya di Desa Trimulyo. Pada saat kajian, para peneliti aktivis sekaligus membangun hubungan individu sebagai basis pengembangan hubungan sosial<sup>13</sup>.

---

Pada saat itu, sudah ada LSM lokal yang lebih dahulu membangun hubungan sosial di Sumberjaya yaitu WATALA yang melakukan pendampingan masyarakat petani yang terkena dampak proyek pembangunan DAM PLTA Way Besay.



Gambar 5. Peta Kawasan Lindung Register 45 B, Sumberjaya  
 Keterangan: Sisipan A = Deforestasi dan Degradasi Di Register 45B  
 Sisipan B = Citra Satelit Indra Jauh 3D Register 45B

Membangun hubungan sosial merupakan langkah awal penting dalam pendekatan SPN. Menurut Robinson<sup>14</sup>, membangun hubungan sosial merupakan kunci sukses dalam mengorganisasikan kegiatan kolektif (*collective actions*) masyarakat lapisan bawah. Hubungan sosial tersebut diciptakan melalui hubungan personal yang dijalin dari waktu ke waktu melalui interaksi tatap muka (*face-to-face interaction*).

Pengalaman membangun hubungan sosial yang dilakukan oleh peneliti aktivis ICRAF dan mitra pada dasarnya dapat distruktur ke dalam tahapan berikut:

- (1) Tahap pertama; membangun hubungan dan kepercayaan bersama (*mutual trust*). Untuk itu dilakukan kunjungan ke desa-desa setiap harinya dan bahkan tinggal bersama dengan masyarakat di desa. Kunjungan dilakukan pada tempat dan waktu yang nyaman bagi penduduk desa.
- (2) Tahap kedua; mengorganisasikan pertemuan desa yang dihadiri oleh berbagai lapisan sosial desa untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini memiliki dua kegunaan: (1) memfasilitasi dialog tentang suatu kasus dan cara pemecahannya, dan (2) mengkaji dinamika perdesaan.
- (3) Tahap ketiga: menggunakan pendekatan PRA untuk membahas isu-isu tentang konservasi tanah dan air, pertanian, kehutanan, peternakan, sejarah status lahan, dan pemetaan sumberdaya. Hasilnya diantaranya berupa data dasar sosial ekonomi, peta penggunaan lahan partisipatif yang dikerjakan bersama antara ICRAF-WATALA-masyarakat petani.

Setelah dua tahun melakukan penelitian awal dan membangun hubungan sosial, pada bulan Agustus tahun 2000, ICRAF bekerjasama dengan WATALA memfasilitasi petani Sumberjaya untuk melakukan kunjungan silang (*cross visit*) ke petani HKm Gunung Betung, Bandar Lampung (Gambar 6). Kunjungan tersebut bertujuan untuk membangun proses pembelajaran bersama antar petani (*farmer to farmer collective learning*) bagaimana mengelola kawasan hutan dengan tetap mempertahankan fungsinya melalui pilihan-pilihan sistem agroforest.



Gambar 6. Proses pembelajaran bersama antara petani Sumberjaya dan Petani Gunung Betung

Dampak dari kunjungan tersebut adalah terbukanya perspektif masyarakat petani Sumberjaya, khususnya yang ikut dalam kunjungan, dalam memandang fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi dari ekosistem hutan. Selain itu pengertian akan pentingnya menanam berbagai spesies pepohonan di samping menanam kopi yang selama ini mereka lakukan, muncul dan menjadi pemahaman bersama (*common understanding*) antar-petani di Sumberjaya. Proses pemahaman bersama tersebut diikuti oleh terbentuknya Tim 11 (merupakan jumlah petani Sumberjaya yang mengikuti kunjungan) yang melakukan inisiatif untuk mensosialisasikan pengalaman yang mereka petik selama kunjungan kepada tetangga dan komunitas petani di Sumberjaya. Merespon kondisi tersebut, pada bulan November 2000, ICRAF memutuskan untuk memobilisasi staf lapangan (terdiri atas dua asisten peneliti dan dua fasilitator teknis) untuk mensolidasi hubungan sosial dengan komunitas petani dan *stakeholder* lokal.

---

Robinson, Eva Cheung. 1998. *Greening at the Grassroot; Alternative Forestry Strategies in India*. Sage Publications. London.

Eksistensi staf lapangan didukung oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Surat No. 050/917/Bpp-LB/IV/2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Konfirmasi Dukungan.

#### **4.2 Membangun Kelompok Untuk Kegiatan Bersama (*collective actions*)**

Menurut Robinson, satuan organisasi masyarakat lapisan bawah (*grassroot communities*) harus berbentuk kelompok sebab komunitas masyarakat perdesaan tidak dapat berfungsi sebagai individual yang otonom. Ketika individu-individu diregangkan dari komunitasnya (baik sosial dan lingkungan alam) mereka menjadi mudah digoyahkan oleh kekuatan luar sehingga menurunkan efektifitas mereka dalam mencapai kegiatan kolektif. Pentingnya membentuk kelompok (*group formation*) tersebut amat disadari dalam rangka mengembangkan ruang dialog dan negosiasi sengketa pengelolaan kawasan hutan, menganalisis dinamika perdesaan, menyusun perencanaan mikro (*micro planning*) dalam satuan hamparan lahan atau desa, dan menyusun jadwal kegiatan kolektif hingga menggali sumberdana mandiri. Bahkan dengan berkelompok, masyarakat petani dapat memiliki kekuatan untuk melakukan aksi politik kolaboratif (*collaborative political actions*).

Pembentukan kelompok petani kawasan hutan di Sumberjaya tidak seluruhnya dilakukan dari titik paling awal. Ketika fasilitasi mulai dilaksanakan, di Sumberjaya sudah hidup beberapa kelompok petani kawasan yang membentuk dirinya sendiri. Hanya kelemahannya pada saat itu adalah belum terbangunnya aturan kelompok yang dapat dijadikan panduan bagi anggota tentang hak dan tanggungjawab mereka dalam mengelola lahan hamparan dan faktor lainnya seperti pengetahuan tentang sistem pertanian konservasi, kebijakan perhutanan, dan fungsi lingkungan dari ekosistem hutan, yang semuanya berkaitan dengan kebutuhan akan penguatan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*) kelompok petani. Program Hutan Kemasyarakatan menjadi landasan dan tujuan bersama (*common ground and common goals*) serta pintu masuk untuk mengeratkan inisiasi masyarakat petani untuk berkelompok. Hal tersebut dapat dimengerti karena masalah kepastian kepemilikan lahan (*land tenure security*) menjadi salah satu masalah utama penyebab konflik pengelolaan kawasan hutan di Sumberjaya.

Hingga saat ini, ICRAF dan kolaborator telah membangun hubungan sosial intensif dengan masyarakat petani melalui kegiatan fasilitasi terhadap 12 kelompok petani HKm di Sumberjaya belum termasuk dua kelompok baru yaitu Kelompok Petani HKm Simpang Kodim dan Air Lirik di Desa Simpangsari. Keduabelas kelompok HKm tersebut beranggotakan 1.035 anggota (terdiri atas anggota individu dan rumah tangga) yang seluruhnya bertani di dalam kawasan hutan lindung. Seperti ditayangkan pada Tabel 1, mereka tersebar di empat desa terdiri atas 38,84% adalah petani Desa Simpangsari, 9,18% petani Desa Sukapura, 7,25% petani Desa Gunungterang farmers, dan 44,73% adalah petani Desa Trimulyo.

Di tingkat akar rumput, saat ini telah terbentuk sebuah asosiasi yang bernama Gabungan Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan (GKPHK<sub>m</sub>) yang juga melakukan fasilitasi terhadap kelompok HKm. Asosiasi ini berdiri tanggal 7 Juli 2001 yang diinisiasi seorang petani dan seorang penyuluh kehutanan yang pro-aktif di Desa Simpangsari.

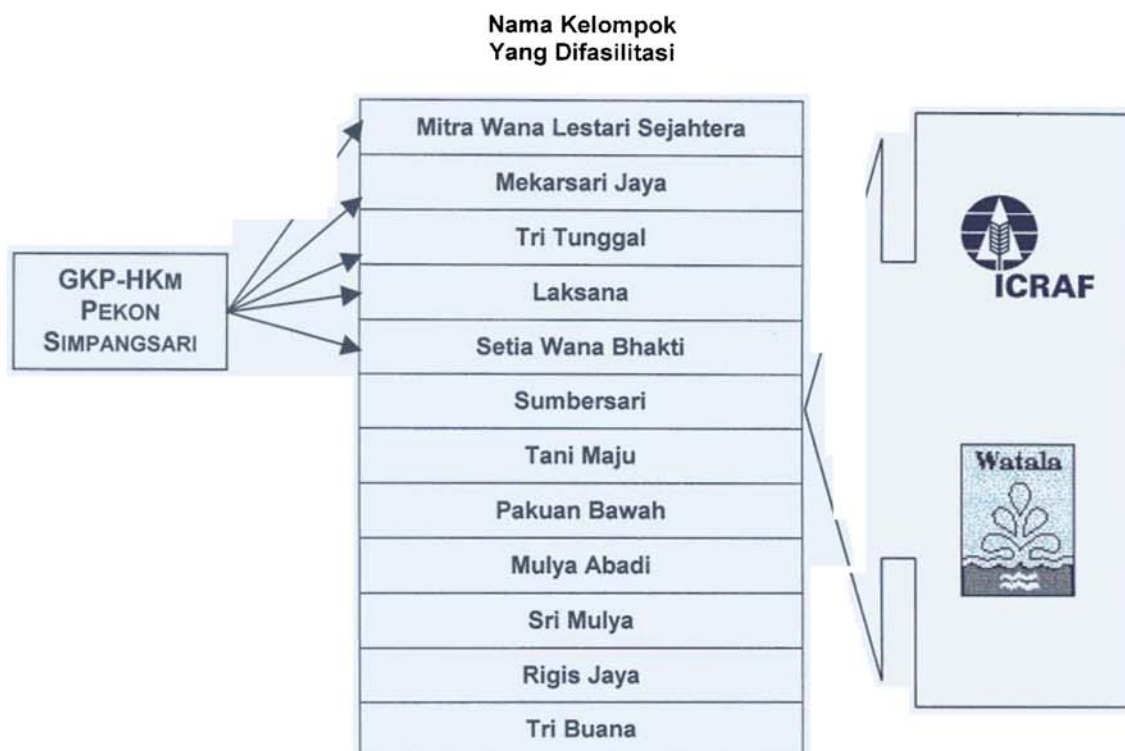


Table 1. Kelompok Masyarakat Petani HKm yang difasilitasi di Sumberjaya

Desa	Nama Kelompok	Jumlah Sub-Kelompok	Jumlah Anggota	Nama hamparan lahan HKm
Simpangsari	Mitra Wana Lestari Sejahtera	4	75	Abung Simpang Sari
	Mekarsari Jaya	1	44	Tepus
	Tri Tunggal	1	49	Lewi monyet
	Laksana	1	15	Laksana
	Setia Wana Bhakti	3	150	Gunung Sari
	Sumbersari	4	69	Tanjungsari
Sukapura				Simpang Kodim **)
				Air Lirikan **)
	Tani Maju	1	33	Pakuan Atas
	Pakuan Bawah	1	25	Pakuan Bawah
	Mulya Abadi	1	17	Abung Sukapura
Gunungterang	Sri Mulya	1	20	Abung Sukapura
	Rigis Jaya	2	75	Rigis
Trimulyo	Tri Buana	11	463	Register 39
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>1.035</b>	

Nurka, Ery (fasilitator ICRAF); Rozie, Hendry, Nedy, Dahfi (fasilitator Watala); Yeni (Observer IPB Bogor)

Terlepas dari proses pembentukannya yang menurut beberapa petani masih *top down*, adanya asosiasi ini semakin memperkaya ruang dialog yang diharapkan akan lebih variatif dalam menghasilkan berbagai upaya pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dengan adanya asosiasi tersebut, peta kegiatan fasilitasi kelompok petani HKm berubah menjadi seperti yang ditayangkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta Jaringan Fasilitasi Kelompok Petani HKm di Sumberjaya.

*Perlu digaris bawahi*, seluruh pembentukan kelompok benar-benar diinisiasi oleh masyarakat petani sendiri, walau harus dicurigai bahwa inisiasi tersebut diduga terstimulasi karena petani mengetahui tentang adanya kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh ICRAF dan WATALA.

Satu hikmah (*lesson learnt*) yang dapat dipetik bahwa hal tersebut merupakan suatu gejala terbangunnya kembali *mutual trust* (rasa saling percaya) dan *self confidence* (keyakinan diri) masyarakat petani setempat terhadap pentingnya “*kerjasama*” dan “*partisipasi*” dalam mengelola kawasan hutan lindung di sub-DAS Way Besay Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Dua “kata mutiara” tersebut selama ini hampir hilang karena disulut oleh berbagai sengketa status lahan di masa lalu termasuk adanya pandangan pemerintah pada saat itu bahwa kegiatan manusia harus dipisahkan dari ekosistem hutan. Upaya represif oleh pemerintah di wilayah ini pernah dilakukan melalui “Operasi Gajah” untuk mengosongkan kawasan hutan dari manusia. Fakta tersebut memiliki kemiripan dengan hasil studi Gill Shepherd (1985) dalam Robinson tentang kegagalan perhutanan sosial di India yang disebabkan oleh (1) lemahnya kerangka kerja kelembagaan dan (2) dukungan teknis bagi perhutanan sosial. Pada aspek kelembagaan yaitu adanya perspektif Departemen Kehutanan India yang secara tradisional memandang hutan, pertanian, dan komunitas masyarakat secara terpisah. Akibatnya, mengosongkan hutan dari manusia dipakai menjadi solusi.

*Sumberjaya kini berbeda dengan dahulu, paling tidak dalam aspek inovasi kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan.* Pengambil keputusan dari unit pemerintahan kabupaten, khususnya Dinas Kehutanan Lampung Barat saat ini, harus diakui memainkan peranan penting terutama dalam membuka pintu dialog bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi mengelola kawasan hutan dan *bernegosiasi semi-permanent land tenure security*. Hal tersebut selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Lampung Barat “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera”. Melalui berbagai momen, masyarakat dapat berdialog dengan pengambil keputusan bahkan hingga ke tingkat Bupati. Di Sumberjaya hingga saat ini sudah dilakukan 4 kali pertemuan tiga bulanan antar kelompok petani HKm. Ditambah dengan pertemuan-pertemuan khusus lainnya, beberapa kesepakatan telah dilakukan secara spontan diantaranya:

- (1) Masyarakat melakukan pengamanan hutan secara mandiri. Kasus kelompok HKm Rigis Jaya Desa Gunung Terang menjadi contoh bagaimana masyarakat secara persuasif meminta penebang liar untuk tidak membuka hutan, dan berhasil. Walaupun pada saat ini pemerintah sedang melaksanakan proyek pengamanan hutan berbasis masyarakat (*Community Based Forest Guandince = CBFG*), adanya contoh kasus Kelompok Rigis Jaya bisa menjadi pola pembandingan bagaimana pengamanan hutan dilakukan oleh masyarakat sendiri karena mereka turut memiliki kepentingan. Berbeda dengan CBFG dimana masyarakat mendapat insentif dari pemerintah untuk melakukan pengamanan.
- (2) Masyarakat mulai mencoba melepas ketergantungan bibit dari pemerintah. Kelompok Abung Sari merupakan contoh kelompok yang mengembangkan pembibitan kelompok secara mandiri, walau dari aspek kualitas bibit masih memerlukan pembinaan.
- (3) Terjadinya de-aselerasi (pelambatan) implementasi Perda No.7/2000 tentang IHH Non Kayu dan SK Dinas Kehutanan No.22/2001 tentang pelaksanaan perda tersebut atas permintaan masyarakat petani kawasan. Dialog kondusif yang difasilitasi oleh WATALA dan ICRAF untuk mempertemukan masyarakat dan Dinas Kehutanan berhasil menyepakati bahwa pengenaan retribusi IHH non kayu kepada petani kawasan ditunda sambil menunggu kelompok petani HKm lebih mandiri baik secara kelembagaan, teknis, dan ekonomis.

(4) Terjadi terobosan yang akan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Lampung Barat tentang pemberian ijin HKm. Pemberian ijin tidak akan semata-mata berdasarkan isi proposal usulan HKm yang demikian bagus, tetapi lebih berdasarkan kepada pembuktian motivasi kelompok tani melalui komunikasi di lapang dan peninjauan upaya dan praktek petani tentang sistem pertanian konservasi di hamparan lahan petani.

#### 4.3 Peta Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Sumberjaya

Pemetaan konflik pengelolaan sumberdaya hutan di Sumberjaya dilakukan dengan tidak serta-merta mempertemukan para-pesengketa ke dalam suatu forum dialog. Pemetaan terlebih dahulu dilakukan dengan metode *Systematic Client Consultation (SCC)*, yaitu suatu upaya menggali perspektif masing-masing pesengketa melalui kunjungan secara terpisah (satu-per-satu) terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan yang berbeda dalam memandang fungsi kawasan hutan lindung di sub-DAS Way Besay. Berdasarkan SCC yang dilakukan, dapat dipetakan para pesengketa sebagai berikut:

1. Dinas Kehutanan Kabupaten
2. PLTA Way Besay
3. Dinas Pariwisata Kabupaten
4. Dinas Pertanian Kabupaten
5. Masyarakat Petani

Isu konflik yang terjadi adalah terutama isu-isu yang berkaitan dengan erosi, kualitas air, kepastian status lahan, dan ekonomi rumah tangga perdesaan. Berdasarkan aktor pesengketa dan isu konflik yang direkam melalui SCC, peta konflik di Sub-DAS Way Besay Sumberjaya seperti ditayangkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Peta konflik kepentingan antar pesengketa dalam pengelolaan sumberdaya hutan di sub-das Way Besay, Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat

Ketebalan garis yang ditayangkan pada Gambar 8 menunjukkan intensitas konflik yang terjadi. Intensitas konflik yang tertinggi terjadi antara Dinas Kehutanan dan masyarakat petani kawasan, baru kemudian diikuti antara PLTA Way Besay dengan masyarakat, Dinas Pariwisata dengan masyarakat, dan antara Dinas Pertanian dengan dengan Dinas Kehutanan. Menarik untuk mencermati konflik yang terjadi, masyarakat

menghadapi tiga oposan. Ketiga oposan mentengarai dan menyengketakan bahwa aktivitas pertanian di dalam kawasan yang dilakukan oleh petani adalah sumber erosi dan penurunan kualitas air di sub-das Way Besay, khususnya sistem pertanian kopi. Selain itu pola *slash and burn* ditengarai menjadi penyebab masalah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan selama ini; kasus ini terutama di Desa Trimulyo. Oleh karena itu, ICRAF sedang melakukan pembuktian bio-fisik melalui penelitian pengukuran erosi dan sedimentasi dari berbagai sistem pertanian kope yang dipraktekkan oleh petani. Sebanyak 3 buah plot pengukuran di lakukan di dusun Tepus, Laksana, dan Bodong.

Satu hal yang perlu juga menjadi catatan, konflik juga terjadi antara Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian kabupaten walaupun intensitasnya amat rendah. Prilaku persengketaan yang terjadi adalah saling menghindar (*avoiding*) sehingga konflik hampir tidak muncul ke permukaan. Perberdaan kepentingan yang terjadi adalah, kurangnya keterpaduan antara program-program yang dilaksanakan oleh kedua unit teknis pemerintah tersebut. Di satu sisi, program pertanian yang ada cenderung kearah pengembangan *fast growth crops species*, sehingga tanpa sadar hal tersebut memotivasi masyarakat untuk menanam spesies yang berorientasi pasar dan kurang beorientasi kepada pengembangan spesies yang sekaligus dapat menjaga fungsi hutan. Di sisi lain, Dinas Kehutanan mempromosikan program yang berbasis *Multi Purposes Species* yang mampu mempertahankan fungsi hutan seperti pepohonan yang sekaligus dapat menghasilkan buah-buahan dan pakan rakyat. Prilaku persengketaan yang saling menghindari (*avoiding*) tersebut dapat dimaklumi mengingat keduanya merupakan unit teknis pemerintah dan berada di bawah payung institusi yang sama yaitu pemerintah kabupaten. Namun pertanyaannya, apakah hal tersebut pernah disadari sebagai sumber konflik yang secara tidak langsung justru juga bisa menjadi faktor penyebab pengelolaan sumberdaya hutan yang kurang lestari?

Setelah dilakukan SCC, langkah berikutnya adalah mempertemukan para pesengketa ke dalam suatu forum melalui seminar yang berjudul "Sistem Pendukung Negosiasi Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Terpadu; Menciptakan Sumberjaya menjadi Sumber Kejayaan Bagi Masyarakat Kabupaten Lampung Barat" di Liwa Kabupaten Lampung Barat pada Bulan Februari 2000. Seminar tersebut dapat dikatakan sepagai suatu forum rekonsiliasi (*islah*), dimana sejak seminar tersebut komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah yang selama ini hampir terputus dan saling mencurigai, terbangun kembali dan menjadi titik awal terbangun kembalinya *mutual trust* antar para-pesengketa bahwa konflik pengelolaan sumberdaya alam di Sumberjaya masih belujm terlambat untuk diatasi. Hal ini merupakan modal sosial (*social capital*) untuk menciptakan berbagai upaya resolusi konflik di kawasan tersebut.

## 5. NEGOSIASI MULTI-TATARAN; Strategi SPN Dalam Konteks Otonomi Daerah.

Dalam proses pengembangannya, strategi pelaksanaan SPN dilakukan secara multi-tataran. Negosiasi multi-tataran dalam Sistem Pendukung Negosiasi (SPN) **diinspirasi** dari sutau pendekatan negosiasi yang disebut *multi tracks diplomacy* (MTD)<sup>15</sup>. Terminologi aslinya, MTD adalah suatu cara konseptual dalam memandang proses pemeliharaan perdamaian (*peace making*) sebagai suatu sistem kehidupan yang berbentuk jaringan saling keterkaitan (*interconnection web*) mencakup komponen-komponen kegiatan, individu, lembaga, dan komunitas masyarakat, yang

---

<sup>15</sup> Diamond, Louise dan Ambassador John McDonald. 1996. *Multi Tracks Diplomacy; A system approach to peace*. Kumarian Press. Connecticut. Amerika Serikat.